

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih belum bisa terselesaikan di khususnya negara berkembang di Indonesia. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan masyarakat dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena pada dasarnya kemiskinan tidak bisa dihilangkan begitu saja dari kehidupan masyarakat Akib (2017). Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang diukur dari pengeluaran individu atau rumah tangga.

Masyarakat yang memiliki total pengeluaran dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Begitu juga sebaliknya, apabila total pengeluaran masyarakat yang berada diatas garis kemiskinan, maka masyarakat tersebut dapat dikategorikan bukan masyarakat miskin. Dalam suatu rumah tangga kemiskinan merupakan permasalahan besar dikehidupan rumah tangga, oleh karena itu rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan memperketat pengeluaran mereka untuk konsumsi baik pangan maupun non pangan. Pilihan konsumsi sangat sulit bagi rumah tangga miskin karena mereka memiliki kendala anggaran yang ketat.

Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup mereka. Pada tingkat pendapatan rendah, maka pengeluaran konsumsi pada umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor

terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup.



Gambar 1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia 2014-2018

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran (BPS).

Tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa rumah tangga di Indonesia terus meningkatkan pengeluaran mereka untuk konsumsi rumah tangga mereka, seperti konsumsi pangan maupun non pangan. Semakin mereka meningkatkan konsumsi rumah tangga mereka maka kesejahteraan akan tercapai, karena pada dasarnya Konsumsi memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, apabila masyarakat mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya maka masyarakat tersebut akan sejahtera.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis makanan juga semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu pemerintah Indonesia

menyelenggarakan sebuah program untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut, yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomer 181 tahun 2012, bantuan sosial (bansos) merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya permasalahan sosial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

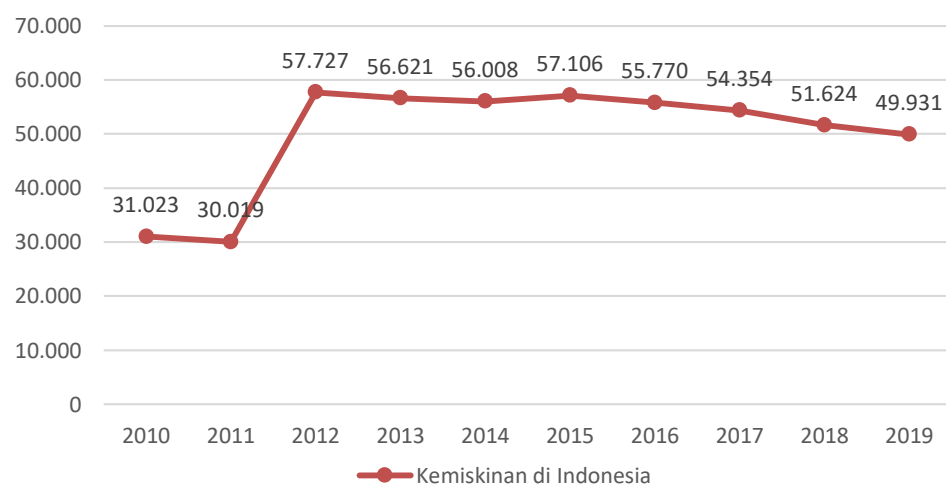
Menurut Permendagri No. 2 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang yang berasal dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam pemberian bantuan sosial, baik pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial, maupun masyarakat sebagai penerima bantuan sosial harus mempertanggungjawabkan bantuan sosial tersebut sesuai dengan porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Terdapat jenis-jenis bantuan sosial berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012, yaitu Bantuan sosial dalam bentuk uang, termasuk belanja yang tidak langsung dalam APBD. Jenis, obyek dan perincian secara detail dari belanja bantuan sosial terhadap pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Selanjutnya bantuan sosial berupa barang, termasuk belanja langsung dalam APBD, yang diinformasikan dalam kegiatan dan program yang diwujudkan dalam bentuk barang, jenis belanja barang dan jasa.

Jenis bantuan sosial ini diberikan ke pihak ketiga atau masyarakat terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

Berbagai bantuan sosial telah diberikan kepada masyarakat Indonesia untuk mengurangi permasalahan-permasalahan ekonomi keluarga. Namun program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan adanya keberhasilan namun juga menunjukkan kekurangan dalam proses penyaluran bantuan sosial tersebut. Masalah ketepatan sasaran penerima bantuan serta manajemen distribusi penyaluran bantuan merupakan masalah utama dalam proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Apabila melihat perkembangan kemiskinan di Indonesia, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial di Indonesia menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat kemiskinan yang cenderung menurun seperti pada gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2 Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2019 (Ribu Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2010-2011, namun pada tahun 2012 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan yang sangat drastis. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penyebab terjadinya peningkatan kemiskinan di tahun 2012 yaitu, semakin melebarnya kesenjangan antarpenduduk miskin dan juga semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Pada tahun 2013-2014 tingkat kemiskinan di Indonesia kembali mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2015 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi dalam dua tahun terakhir. Antara september 2014 sampai maret 2015 tingkat inflasi di Indonesia berakumulasi menjadi 4,03%. Selama periode ini, harga rata-rata beras naik 14,5% yang menyebabkan masalah besar karena penduduk miskin Indonesia harus mengurangi porsi dari pendapatan mereka yang dipersiapkan untuk membeli beras. Oleh karena itu naiknya harga beras menyebabkan dampak negatif dan mendorong sebagian dari sekelompok besar penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kemudian tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan ditahun-tahun berikutnya.

Meskipun cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, akan tetapi penurunan pada tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung melambat. Perlambatan tersebut mengindikasikan bahwa taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia pada kemiskinan juga mengalami perlambatan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia juga tergantung pada masing-masing wilayah, sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang beragam

pada berbagai wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga beragam di masing-masing wilayah. Menurut BRS (berita resmi statistik) yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik, presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, kemudian meningkat menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara itu presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, kemudian meningkat menjadi 12,82 persen pada Maret 2020.

Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 33,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Menurut data tersebut, maka tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan.

Meningkatnya industrialisasi yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan di kota-kota besar membuat angka kemiskinan perkotaan lebih rendah dari perdesaan. Karena masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, ketika individu mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sementara itu kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah perdesaan menyebabkan masyarakat yang tinggal di perdesaan memilih untuk bermigrasi ke wilayah perkotaan agar mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini berarti masyarakat di wilayah

perkotaan lebih sejahtera dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Terdapat berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan, salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah dengan menciptakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan program-program yang dijalankan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di Indonesia, pemerintah juga secara rutin melakukan evaluasi dan melakukan perubahan atas program-program untuk mengatasi permasalahan sosial agar berjalan dengan efektif. Brillianti (2020) menegaskan bahwa saat ini setidaknya terdapat 89 program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan sosial khususnya kemiskinan.

Achmad (2017) menegaskan bahwa diantara program-program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, terdapat dua program unggulan yang sangat dikenal di Indonesia, yaitu program bantuan tunai dan program unggulan jaminan kesehatan. Program bantuan tunai merupakan program bantuan yang diselenggarakan pemerintah dalam bentuk bantuan, baik secara langsung maupun bersyarat. Terdapat tiga macam program bantuan tunai yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, yaitu Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung sementara Masyarakat (BLSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Diantara ketiga program tersebut, BLT merupakan program bantuan pertama kali yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial khususnya kemiskinan yang ada di Indonesia. Sementara itu program BLSM dan PKH

merupakan program perbaikan dari BLT. Namun, pada dasarnya ketiga program tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu untuk mengatasi permasalahan sosial dilingkungan masyarakat.

Sementara itu studi yang sama di Indonesia dilakukan oleh Amrullah (2020) dalam penelitiannya membahas tentang dampak bantuan langsung tunai terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia yang menyatakan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai memberikan dampak positif bagi rumah tangga penerima dalam aspek asupan kalori dan protein per kapita/hari. Bantuan Langsung Tunai juga berdampak positif terhadap pengeluaran pangan per kapita dan pangsa pengeluaran pangan. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai berdampak pada perubahan pangsa pengeluaran pangan dimana terjadi pergeseran konsumsi pangan dari kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur menuju kelompok padi-padian, makanan dan minuman jadi, serta rokok.

Subanti (2016) juga melakukan studi yang sama yaitu membahas tentang dampak program bantuan langsung tunai terhadap konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah, dalam penelitiannya ini menemukan tiga temuan. Pertama, bantuan langsung tunai meningkatkan total konsumsi rumah tangga (termasuk makanan dan non makanan). Kedua, bantuan langsung tunai meningkatkan konsumsi rumah tangga untuk kesehatan tetapi menurunkan konsumsi rumah tangga untuk pendidikan. Ketiga, bantuan langsung tunai meningkatkan konsumsi rumah tangga untuk padi, umbi-umbian, sayur-mayur, dan tembakau tetapi

menurunkan konsumsi rumah tangga untuk ikan, daging, telur dan susu, buah-buahan, serta makanan dan minuman kemasan.

Jika melihat perkembangan kemiskinan di Indonesia khususnya di daerah perkotaan dan perdesaan yang semakin meningkat dan juga minimnya penelitian mengenai program bantuan sosial terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia menjadikan program bantuan sosial termasuk BLT yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia masih belum efektif untuk mengatasi permasalahan sosial termasuk permasalahan kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu pemerintah Indonesia harus terus melakukan evaluasi dan perubahan pada program-program bantuan agar berjalan lebih efektif lagi.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan evaluasi terhadap program bantuan sosial. Melihat kondisi tingkat kemiskinan di Indonesia yang mengalami perlambatan dalam penurunannya, sedangkan tingkat konsumsinya juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terkait efektivitas kinerja program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Program Bantuan Langsung Tunai untuk diteliti, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Melambatnya penurunan kemiskinan di Indonesia, menyebabkan kurang efektifnya program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh

Pemerintah untuk permasalahan sosial yang ada dilingkungan masyarakat Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah:

Bagaimana pengaruh bantuan langsung tunai terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh bantuan langsung tunai terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan kepustakaan yang berkaitan dengan program bantuan langsung tunai yang berpengaruh pada konsumsi rumah tangga di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait dengan program-program pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial khususnya kemiskinan di Indonesia.

Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan kajian dimasa yang akan datang.